

Judul : Marak Penyelundupan Benih Lobster: Pengusaha Ogah Budi Daya
Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Marak Penyelundupan Benih Lobster Pengusaha Ogah Budi Daya

Senayan menyoroti masih adanya praktik penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) ke Vietnam. Ekspor ilegal itu diduga menggunakan mobil ambulance dan mobil jenazah agar dapat lolos dari pemeriksaan.

HAL tersebut diungkap Ketua Komisi IV DPR Sudin saat menerima audiensi dari Penggiat Budidaya Lobster Nusantara (PBLN) di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin. Audiensi ini membahas soal larangan ekspor BBL yang ditetapkan Pemerintah.

Sudin menuturkan, sebenarnya negara kita memiliki kemampuan untuk melakukan budi daya lobster. Hanya saja, kegiatan budi daya ini menjadi sulit dilakukan lantaran selalu saja ada segelintir pihak yang lebih condong ekspor.

"Ya gitu lah. Kalau budi daya kan lama, makan waktu," kata Sudin.

Karena itu, ada pengusaha yang menempuh jalur melawan hukum dengan melakukan ekspor BBL ini.

Sudin lalu mengungkap modulus para pengusaha ekspor BBL secara ilegal. Dari informasi yang diperolehnya, tempat packaging BBL ini biasanya dilakukan di Tangerang dan Kapuk, Jakarta Barat.

Menurutnya, BBL yang dikirim tersebut sebagian besar berasal dari Lampung.

"Biasanya dikawal. Tanda kuitip, kalau tidak pakai ambulans, pakai mobil jenazah, atau pakai oknum," ungkap politisi senior Fraksi PDI Perjuangan ini.

Dia bilang, setiap kegiatan penyelundupan BBL sudah pasti ada cukongnya. Makanya, BBL yang akan diekspor secara ilegal ini agar bisa lolos tidak hanya pakai ambulans, juga pesawat hingga kapal laut.

"Kalau dari Lampung, dibawa ke Palembang. Kemudian ke

Batam lalu ke Singapura. Di Singapura di-packaging ulang baru dibawa ke Vietnam," bebernya lagi.

Sudin pernah protes kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kenapa kapal penyelundup ini tidak pernah ditangkap.

"Jawabannya gampang. Kecepatan kami (kapal Ditjen PSDKP, red) cuma 40 knot, sementara (kapal) penyelundup 60 knot. Ini yang terjadi," sesalnya.

Sudin bilang, sebenarnya Permen KKP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*panulirus* Spp.), Kepiting (*scylla* Spp.) dan Rajungan (*portunus* Spp.) sudah sangat bagus. Permen KKP ini melarang ekspor. Penghentian ini dilakukan karena perintah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan banyak sekali penyelundupan.

Adapun di dalam Permen ter-

sebut, ungkap Sudin, dikatakan harus ada budi daya. Setelah lobster berkembang sekitar 5 atau 6 centimeter, baru bisa diekspor. "Tetapi yang dilakukan, belum budi daya sudah diekspor," tegasnya.

Sudin pun berpesan kepada para pegiat budi daya lobster ini agar melaporkan jika mengetahui adanya penyelundupan BBL ini.

"Tolong bantu kami apabila ada informasi yang belum kami dapatkan tentang penampungan atau penyelundupan benih-benih lobster," pungkasnya.

Anggota Komisi IV Edward Tannur menambahkan, nelayan tidak perlu cemas dengan adanya pelarangan ekspor BBL ini karena niatannya sangat bagus.

"Jadi, semua kekayaan di Republik ini digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi nelayan tidak usah takut. Kami ini wakil rakyat, bukan wakil pengusaha," tegasnya.

Edward menegaskan, aturan

pelarangan ekspor BBL ini sudah barang tentu telah melalui kajian dengan baik. Sehingga aturan yang ada, tidak saling merugikan atau hanya menguntungkan salah satu pihak. Makanya, dia mendorong agar budi daya lobster di dalam negeri ini diperbanyak.

"Ini kok malah kita kirim (BBL) ke luar negeri. Apa orang Indonesia tidak mampu budi daya lobster ini, atau lebih enak kalau kirim saja (BBL) yang nilainya hanya Rp 10 ribu ini," ujarnya.

Untuk itu, dia meminta PBLN memperbanyak budi daya lobster di Indonesia. Dia yakin, manfaat yang diterima bangsa ini lebih banyak jika kegiatan budi daya lobster ini lebih digencarkan daripada cara instan ekspor BBL ke Vietnam.

"Kita juga perlu kerja sama dengan kementerian karena pendapatan PNBPN ini. Jangan hanya mau jual ke luar negeri, tapi tidak memikirkan kelestarian dari lobster," katanya. ■ KAL